



BAB 9

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

9.1. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2014-2019 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Jawa Timur lima tahun. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Disamping hal tersebut, seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Jawa Timur diupayakan mampu menjaga keselarasan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun disajikan dalam Tabel 9.1.





Tabel 9.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian			Target			Akhir Periode RPJMD Thn. 2019
		Thn. 2014	Thn. 2015	Thn. 2016	Thn. 2017	Thn. 2018	Thn. 2019	
1	Pertumbuhan PDRB/LPE (%)	5,86	5,44	5,55	5,56-5,86	5,61-5,96	5,66-6,06	5,66-6,06
2	Indeks Gini	0,37	0,40	0,40	0,390-0,400	0,385-0,400	0,380-0,400	0,380-0,400
3	Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia (<40%)	18,63	16,61	17,03	18,00-18,20	18,20-18,40	18,40-18,60	18,40-18,60
4	Persentase Penduduk Miskin	12,28	12,28	11,85	11,80-11,50	11,50-11,20	11,20-10,90	11,20-10,90
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,14	68,95		69,50-69,75	69,75-70,00	70,00-70,25	70,00-70,25
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,83	91,07	91,77	92,39-92,90	92,91-93,50	93,51-94,01	93,51-94,01
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,19	4,47	4,21	4,17-4,08	4,08-3,99	3,99-3,90	3,99-3,90
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	56,48	61,70	63,98	63,98-65,49	65,49-67,00	67,00-68,52	67,00-68,52
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,00	80,00	81,00	81,00-82,00	82,00-83,00	83,00-84,00	83,00-84,00
10	Indeks Reformasi Birokrasi	61,04	63,00	65,00	65,00-67,00	67,00-69,00	69,00-71,00	69,00-71,00
11	Indeks Kesalehan Sosial				>60	>60	>60	>60



9.2. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2014-2019 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek



Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain produktivitas total daerah, Nilai Tukar Petani, dan lama pelayanan perijinan.

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut secara rinci disajikan pada Tabel 9.2.

